



Photo by Andreas Fitri Atmoko- Antara

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN PERIODE 2016 - 2021
SRI PURNOMO DAN SRI MUSLIMATUN

smart education



*Menuju Kabupaten Cerdas
tahun 2021*

smart governance



smart healthcare



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN - 2016

Pemerintah Kabupaten Sleman
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon. (0274) 868405 Faksimile (0274) 868945 - Laman: slemankab.go.id

*Motif Batik Khas Sleman
Sinan Panipetho Salata*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan.



LKjIP disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu Bab I Pendahuluan diantaranya memuat Latar Belakang dan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Sleman, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup. Materi Perencanaan Kinerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Materi Akuntabilitas Kinerja memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target 15 sasaran yang terdiri dari 39 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 dengan realisasi kinerjanya, sehingga dapat diketahui persentase capaian kinerjanya.

LKjIP ini kami harapkan dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan kepada kami dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hasil kinerja yang dicapai dapat digunakan sebagai pemacu perbaikan peningkatan kinerja selanjutnya bagi jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sleman.



Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan dukungan semua pihak dalam penyelesaian LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman maupun pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2016. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kami memujudkan visi pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* pada Tahun 2021".

Sleman,

Bupati Sleman

ttt

SRI PURNOMO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam periode kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Terpilih masa bakti tahun 2016-2021 yaitu Bapak Drs. H. Sri Purnomo, MSI dan Ibu Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes., telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada tahun pertama masa bakti tahun 2016-2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 termasuk perubahannya.

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut, dilaporkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016. Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 15 sasaran yang terdiri dari 39 indikator kinerja dengan realisasi kerjanya, sehingga dapat diketahui persentase capaian kerjanya. Hasil pengukuran kinerja meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 13 sasaran atau 86,66%, capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 1 sasaran atau 6,67%, dan capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 1 sasaran atau 6,67%. Selain itu juga diinformasikan data capaian kinerja dibandingkan dengan data capaian kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia, program yang mendukung sasaran, realisasi anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran atau indikator kinerja, dan prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman selama tahun 2016 terkait dengan sasaran atau indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, serta dilengkapi foto kegiatan dan foto dokumen prestasi. Berdasarkan analisa efisiensi dengan cara membandingkan tingkat capaian sasaran dengan penggunaan sumber daya anggaran, dari 15 sasaran menunjukkan 14 sasaran diantaranya mencapai efisien atau mencapai 93,33%.

Sehubungan masih terdapat sasaran pembangunan yang kurang menggembirakan, dengan capaian kinerja 78,06% kategori “cukup berhasil” sebanyak 1 (satu) sasaran pembangunan yaitu “meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertanian”, perlu dijelaskan bahwa pada indikator kinerja sektor perdagangan yaitu nilai ekspor hanya tercapai 79,73% disebabkan adanya perusahaan produk ekspor memindahkan usahanya ke luar wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian pada sektor pertanian pada indikator kinerja “persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan” dari target 3,26% terealisasi -2,21% atau mencapai -67,87%. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 terjadi musim hujan sepanjang tahun sehingga terjadi penurunan produksi sebagian besar komoditas pertanian dan perkebunan, yang menjadi dasar perhitungan indikator kinerja ini. Produksi tidak tercapai diakibatkan produktifitas menurun dan luas panen juga menurun, karena petani beralih ke tanaman di luar komoditas untuk perhitungan produksi, misalnya kacang tanah, kacang panjang, sayuran, dan sebagainya.

Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah ditindaklanjuti, dan telah direncanakan pula tindak lanjutnya untuk tahun 2018.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1
	C. Organisasi Perangkat Daerah	3
	D. Sumber Daya Aparatur	8
	E. Sumber Daya Keuangan	9
	F. Isu Strategis	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
	A. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	14
	B. Misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021	14
	C. Tujuan Pembangunan Daerah	14
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	18
	E. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	21
	C. Evaluasi Kinerja	22
	1. Evaluasi Kinerja Sasaran 1	22
	2. Evaluasi Kinerja Sasaran 2	24
	3. Evaluasi Kinerja Sasaran 3	26
	4. Evaluasi Kinerja Sasaran 4	32
	5. Evaluasi Kinerja Sasaran 5	34
	6. Evaluasi Kinerja Sasaran 6	40
	7. Evaluasi Kinerja Sasaran 7	43
	8. Evaluasi Kinerja Sasaran 8	56
	9. Evaluasi Kinerja Sasaran 9	58
	10. Evaluasi Kinerja Sasaran 10	61
	11. Evaluasi Kinerja Sasaran 11	63
	12. Evaluasi Kinerja Sasaran 12	65
	13. Evaluasi Kinerja Sasaran 13	70
	14. Evaluasi Kinerja Sasaran 14	72
	15. Evaluasi Kinerja Sasaran 15	74
	D. Akuntabilitas Keuangan dalam Pencapaian Sasaran	76
	1. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	76
	2. Analisis Efisiensi Dana Dekonsentrasi	77
	3. Analisis Efisiensi Dana Tugas Pembantuan	78
BAB IV	PENUTUP	79



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sleman ini merupakan pelaporan kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016–2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016. Kinerja yang dilaporkan Pemerintah Kabupaten Sleman meliputi informasi pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian kinerja sasaran, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target yang direncanakan dalam RPJMD.

B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri dari urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren dibagi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, sehingga kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:



a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olahraga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) perpustakaan; dan
- 17) kearsipan.

c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

C. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah dibentuk untuk menyelenggarakan kewenangan yang sesuai urusan pemerintahan dan mencacu peraturan perundang-undangan pemerintah pusat., Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas tahun 2016 dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan telah mengalami tiga kali, perubahan yang ditetapkan dalam:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan pertama); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 (perubahan kedua).



Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016 sebanyak 47 OPD, yaitu:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- d. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- i. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral;
- j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- k. Dinas Pasar;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Pendapatan Daerah ;
- n. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- p. Badan Kepegawaian Daerah;
- q. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan;
- r. Badan Lingkungan Hidup;
- s. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. Inspektorat Kabupaten;
- w. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- x. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
- y. Kantor Perpustakaan Daerah;
- z. Kantor Arsip Daerah;
- aa. Kantor Kesatuan Bangsa;
- bb. Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah;
- cc. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- dd. Kecamatan yang terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Gamping;
 - 2) Kecamatan Godean;
 - 3) Kecamatan Moyudan;
 - 4) Kecamatan Minggir;
 - 5) Kecamatan Seyegan;
 - 6) Kecamatan Mlati;
 - 7) Kecamatan Depok;
 - 8) Kecamatan Berbah;
 - 9) Kecamatan Prambanan;
 - 10) Kecamatan Kalasan;
 - 11) Kecamatan Ngemplak;
 - 12) Kecamatan Ngaglik;
 - 13) Kecamatan Sleman;
 - 14) Kecamatan Tempel;
 - 15) Kecamatan Turi;
 - 16) Kecamatan Pakem; dan
 - 17) Kecamatan Cangkringan.



Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik pada OPD juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016 sebanyak 78 UPT, yaitu:

- 1) Laboratorium Kesehatan
- 2) UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan
- 3) UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
- 4) Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
- 5) Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II
- 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I
- 7) Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II
- 8) Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan



- 9) Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
- 10) Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan
- 11) Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
- 12) Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II
- 13) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I
- 14) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II
- 15) Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III
- 16) Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah
- 17) Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan
- 18) Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan
- 19) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I



- 20) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II
- 21) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I
- 22) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II
- 23) Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman
- 24) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I
- 25) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II
- 26) Pusat Kesehatan Masyarakat Turi
- 27) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem
- 28) Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan
- 29) Sanggar Kegiatan Belajar
- 30) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping
- 31) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean
- 32) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan
- 33) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Minggir
- 34) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Seyegan
- 35) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati
- 36) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok
- 37) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah
- 38) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Prambanan
- 39) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan
- 40) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak
- 41) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik
- 42) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman
- 43) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel
- 44) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Turi
- 45) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Pakem
- 46) UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan
- 47) Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan
- 48) UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan
- 49) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan
- 50) Sub Terminal Agribisnis
- 51) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah I
- 52) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah II
- 53) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah III
- 54) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah IV
- 55) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah V
- 56) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VI
- 57) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VII
- 58) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VIII

- 59) Balai Latihan Kerja
- 60) Rumah Susun Sederhana Sewa
- 61) Taman Pemakaman Umum
- 62) UPT Peralatan, Perbekalan, dan Laboratorium
- 63) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- 64) Taman Kuliner Condongcatur
- 65) UPT Pelayanan Pasar Kelompok I
- 66) UPT Pelayanan Pasar Kelompok II
- 67) UPT Pelayanan Pasar Kelompok III
- 68) UPT Pelayanan Pasar Kelompok IV
- 69) UPT Pelayanan Pasar Kelompok V
- 70) UPT Pelayanan Pasar Kelompok VI
- 71) UPT Pelayanan Pasar Kelompok VII
- 72) Museum Gunungapi Merapi
- 73) UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo
- 74) Unit Layanan Pengadaan
- 75) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal
- 76) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
- 77) UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah
- 78) UPT Pemadam Kebakaran

Berdasarkan OPD dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebanyak 846 jabatan struktural, yang terdiri dari:

1. eselon IIa: 1
2. eselon IIb: 31
3. eselon IIIa: 57
4. eselon IIIb: 95
5. eselon IVa pada OPD: 390
6. eselon IVa pada UPT: 78
7. eselon IVb pada OPD: 37
8. eselon IVb pada UPT: 78
9. eselon Va Kepala Tata Usaha SMK: 8
10. eselon Va Kepala Tata Usaha SMP/SMA: 71



D. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditempatkan pada organisasi perangkat daerah per 31 Desember 2016 sebanyak 11.266 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	3	9	12	0.73
SLTP	185	32	217	1.93
SLTA	1.309	939	2.248	19.95
D.I	36	94	130	1.15
D.II	347	532	879	7.80
D.III	277	610	887	7.87
Sarmud	48	58	106	0.94
D.IV	41	42	83	0.74
S-1	2.088	3.969	6.057	53.76
S-2	307	270	577	5.12
Jumlah	4,711	6,555	11,266	100.00

2. Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
I	105	11	116	1.03
II	949	452	1401	12.44
III	1.918	3.205	5.123	45.47
IV	1.739	2.887	4.626	41.06
Jumlah	4.711	6.555	11.266	100.00





3. Berdasarkan Eselon

Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
II.a	0	0	0	0.00
II.b	19	10	29	3.75
III.a	34	19	53	6.85
III.b	61	29	90	11.63
IV.a	258	174	432	55.81
IV.b	59	54	113	14.60
V.a	29	28	57	7.36
Jumlah	460	314	774	100.00

4. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Struktural	460	315	775	6.88
Fungsional Guru	2.082	4.365	6.447	57.23
Fungsional Non Guru	409	973	1.382	12.27
Staf	1.760	902	2.662	23.63
Jumlah	4.711	6.555	11.266	100.00

E. Sumber Daya Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)* tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	Pendapatan Daerah	2.356.293.841.455,73	2.183.747.824.232,36
1.	Pendapatan Asli Daerah		648.841.915.155,32
2.	Dana Perimbangan		1.321.933.392.623,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah		212.972.516.454,04
B	Belanja Daerah	2.498.770.228.801,22	2.647.865.812.373,38
1.	Belanja Tidak Langsung		1.464.573.514.127,78
2.	Belanja Langsung		1.183.292.298.245,60
C	Surplus/Defisit		(464.117.988.141,02)

*) APBD setelah Perubahan



F. Isu Strategis

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2016, yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi

Persentase penduduk miskin tahun 2014 sebesar 11,85%. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,04%. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang serius untuk menurunkan angka tersebut mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 43.798 KK.

2. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2014 masih sebesar 4,21%, atau sebanyak 25.943 orang. Hal ini disebabkan peluang kerja/kesempatan kerja yang ada tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja atau dengan kata lain ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran kerja. *Link match* antara pasar kerja dengan pencari kerja belum optimal. Di samping itu, penyebab yang lebih utama dikarenakan Sleman tidak bisa menciptakan kawasan industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Sleman masih berada di bawah angka 79, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi berada di angka 50.

4. Adanya bonus demografi

Jumlah penduduk usia produktif di Sleman cenderung meningkat, yang antara lain disebabkan oleh migrasi masuk yang lebih besar dibandingkan dengan migrasi ke luar (migrasi bersih positif). Migrasi masuk ke Kabupaten Sleman didominasi dua kelompok penduduk, yaitu penduduk usia sekolah (mahasiswa) dan juga lansia. Hal ini memunculkan bonus demografi, yang harus dikelola dengan tepat.

5. Ketimpangan pendapatan masih berada dalam kategori sedang

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Tahun 2014 Indeks Gini Sleman berada di 0,37 (angka sementara), masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang, namun diperlukan upaya yang lebih strategis agar pendapatan semakin merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

6. Produktivitas pertanian masih rendah

Kabupaten Sleman merupakan lumbung padi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai produktivitas Tahun 2014 sebesar 60,01 kw/ha. Produktivitas ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata DIY, disebabkan oleh akses petani terhadap *input* pertanian belum optimal, penerapan teknologi belum optimal, kelembagaan dan jejaring petani belum optimal, di samping rendahnya nilai tambah produk pertanian.

7. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal

Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan produk pangan lokal. Selain itu, peningkatan produktivitas, termasuk di dalamnya ketersediaan, dan tingkat keamanan produk pangan lokal perlu ditingkatkan.

8. Tata kelola dan tata guna air perlu ditingkatkan

Hal ini perlu dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha pertanian dan perikanan. Selain itu, fungsi kelembagaan petani pembudidaya ikan dan pertanian perlu lebih ditingkatkan.

9. Pengembangan kompetensi dan daya saing Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) belum optimal.

Kualitas, aksesibilitas, konektivitas ODTW di Kabupaten Sleman masih perlu dikembangkan untuk memastikan kenaikan tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman, melalui peningkatan



kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan, pengaturan sarana dan prasarana pariwisata, dan intensifikasi pemasaran pariwisata.

10. Peran sektor perindustrian di Kabupaten Sleman yang belum optimal.

Sampai tahun 2014, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 14,32% per tahunnya, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 1,42% per tahun. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan peran sektor industri antara lain kualitas SDM industri, aksesibilitas permodalan, teknologi, dan pemasaran.

11. Peran sektor perdagangan, baik perdagangan dalam maupun perdagangan luar negeri yang masih belum optimal, yang menyebabkan distribusi barang yang belum lancar.

12. Peran sektor koperasi dan usaha kecil menengah sebagai salah pilar perekonomian masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM, dan perluasan layanan dalam mengantisipasi dampak negatif pemberlakuan pasar bebas menjadi dua hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat ditingkatkan. Termasuk di dalamnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan UKM lokal, sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Tentunya upaya penguatan modal dan



pendampingan bagi Koperasi dan UKM perlu terus dilaksanakan untuk menjamin efektifitas usaha.

13. Pengelolaan penanaman modal belum optimal

Perencanaan dan pengembangan penanaman modal/investasi belum inklusif, birokrasi dan pelayanan perizinan belum optimal. Penanaman modal di Kabupaten Sleman belum memberikan *multiplier-effect* yang diharapkan, sehingga belum berkontribusi maksimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sleman secara inklusif.

14. Meningkatnya jumlah anak berhadapan dengan hukum serta anak dan perempuan yang mengalami kekerasan.

15. Pengendalian alih fungsi lahan belum optimal.

Tekanan penduduk merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Indikasi perubahan tersebut adalah tingginya luas penggunaan lahan permukiman baru, dan perubahan lahan pertanian menjadi nonpertanian rata-rata sebesar 0,11% per tahun.

16. Cakupan jaminan kesehatan belum optimal

Persentase cakupan jaminan kesehatan masih sebesar 77,64%. Diperlukan upaya perluasan *coverage* untuk menjamin seluruh penduduk Sleman telah masuk dalam jaminan kesehatan masyarakat

17. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai

Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana yang ada, jumlah EWS awan panas yang diperlukan sebanyak 26 buah untuk 26 titik lokasi. Namun yang ada baru sebanyak 8 lokasi dan hanya 4 buah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman atau 30,77%. Selanjutnya untuk EWS banjir lahar diperlukan sebanyak 16 EWS sedangkan yang dimiliki baru 11 buah atau 56,25%. Untuk EWS tanah longsor belum memiliki EWS tanah longsor atau 0%.

Untuk penanggulangan bahaya kebakaran saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman baru memiliki 3 unit mobil dengan kapasitas 3.000-5.000 liter, idealnya memiliki 6 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk meningkatkan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) perlu dibentuk 2 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Godean dan Depok.

18. Kondisi fisik pasar tradisional belum memadai



Jumlah pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sleman sebanyak 41 pasar. Dari total jumlah tersebut, pasar tradisional yang dalam kondisi baik sebanyak 13 pasar atau 31,70%, artinya masih ada 28 pasar tradisional yang perlu pembenahan.

19. Pengelolaan jaringan irigasi belum optimal

Jaringan irigasi di Sleman termasuk dalam kategori memadai, namun masih terdapat lahan pertanian yang tidak terairi dan munculnya konflik pemanfaatan air. Diperlukan upaya pengelolaan yang proporsional dalam pendistribusian air baik untuk kepentingan pertanian maupun perikanan serta upaya antisipatif terhadap kelangkaan air di musim kemarau.

20. Penanganan persampahan dan air limbah belum optimal

Timbunan sampah di Kabupaten Sleman tahun 2013 sebesar 1.392,80 m³/hari, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.445,72 m³/hari. Pelayanan pengangkutan sampah telah menjangkau seluruh wilayah di 17 kecamatan dengan 39 dumtruck dan 2 unit armroll, namun masih memerlukan tambahan sambungan rumah untuk IPAL terpusat di KPY dan Komunal di kawasan perdesaan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

A. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* pada Tahun 2021".

B. Misi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

C. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan pembangunan daerah adalah:

- a. menguatkan tata kelola pemerintahan daerah
- b. meningkatkan pembangunan manusia.
- c. meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat
- e. mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak



Tabel 2.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	A
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	$IPM = \sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ <p>I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)</p>	%						



Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini berada antara 0 dan 1	Angka absolut 1 dikurangi dengan jumlah total Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas tertentu dikalikan dengan Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai dengan kelas yang dimaksud	Indeks	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat	Jumlah lembaga tangguh bencana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Lembaga tangguh bencana meliputi desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terbagi dalam tiga komponen yang terdiri dari Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan	Akumulasi jumlah lembaga tangguh bencana IKLH_Sleman = $(IPA+IPU+ITH)/3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan	Desa dan Sekolah	21 dan 36	29 dan 44	37 dan 52	45 dan 60	53 dan 68	61 dan 76
					%	36,82	37	37,5	38	38,5	40



Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DIY	Desa budaya adalah desa yang mempunyai: struktur organisasi/ pengurus, memiliki program dan rencana kegiatan serta memiliki potensi budaya seperti adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner; pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya	Jumlah desa budaya yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014	Desa	8	10	12	14	16	18



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016 disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Sleman Tahun 2016, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman dan Perubahannya Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat LAKIP Kabupaten	A	
		2. Opini BPK terhadap LKD	WTP	
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	30%	
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,67	
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,47 tahun	
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	78,20%	
		2. APK SD/MI	≥ 100 %	
		3. APK SMP/MTs	≥ 100 %	
		4. APK SMA/SMK/MA	86,45 %	
		5. APM SD/MI	≤ 100 %	
		6. APM SMP/MTs	83,97 %	
		7. APM SMA/SMK/MA	58,96 %	
		8. Rata-rata lama sekolah	10,33 tahun	
		9. Harapan rata-rata lama sekolah	15,71	
		Nilai rata-rata ujian		
		10. SD	236,17	
		11. SMP	261,65	
		12. SMA	335,25	
13. SMK	252,93			
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi	5,40 %	
		2. Indeks gini	≤ 0,40	
7.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertanian	1. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,63	
		2. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,00	
		3. Jumlah kunjungan wisatawan	4.117.000	
		4. Nilai ekspor	42.000.000 US\$	
		5. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	3,256	
		6. Nilai tukar petani	111,65	
		7. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	2,7	
8.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6 %	
9.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian	1. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	65,99 %	
		2. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	65,25 %	
10.	Menurunnya Kemiskinan	Persentase KK Miskin	10,69 %	
11.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana		
		1. Desa	21	
		2. Sekolah	36	
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Pencemaran Air Sungai	42	
		2. Indeks Pencemaran Udara	40	
		3. Indeks Tutupan Hutan	32,25	
13.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak	1 %	
14.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Jumlah Konflik SARA	≤ 5	
15.	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Warisan Budaya	23,80	



E. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	80,90
2.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,47
3.	Indeks Gini	Indeks	≤ 0,40
4.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,40
5.	Persentase keluarga miskin	%	10,69
6.	Indeks Pembangunan Gender	%	96,15
7.	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,67
8.	Nilai ekspor	US\$	42.000.000
9.	Persentase Peningkatan nilai Produksi	%	2,7
10.	Jumlah lembaga tangguh bencana	Desa dan Sekolah	21 dan 36
11.	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	%	30
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	36,82
13.	Indeks Pencemaran Sungai	Nilai	42,00
14.	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	40
15.	Indeks Tutupan hutan	Nilai	32,25
16.	Lama tinggal wisatawan	Hari	Wisatawan Nusantara: 1,63 Wisatawan Mancanegara: 2,00
17.	Jumlah wisatawan	Orang	4.117.000
18.	Tingkat pengangguran terbuka	Rasio	6,00
19.	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	3,256
20.	Persentase Nilai Tukar Petani	%	111,65
21.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,20
22.	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	%	APK SD/MI: ≥ 100%, APK SMP/MTs: ≥ 100% APK SMA/SMK/MA: 86,45% APM SD/MI: ≤ 100% APM SMP/MTs: 83,97% APM SMA/SMK/MA: 58,96%
23.	Rata rata lama sekolah	Tahun	10,33
24.	Harapan lama sekolah	Tahun	15,71
25.	Nilai rata rata ujian SD, SMP, SMA	SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK	236,17 261,65 335,25 252,93
26.	Persentase pelestarian warisan budaya	%	23,80
27.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	1
28.	Jumlah kasus SARA	Jumlah kasus	≤ 5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyampaikan akuntabilitas kinerja tahun 2016, melalui pengukuran kinerja atas dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016. Informasi akuntabilitas kinerja disajikan dalam tabel yang memuat realisasi/capaian kinerja sasaran, program dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran, dan pretasi kinerja yang terkait sasaran.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan Sasaran (*target*) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d <95	Berhasil
3.	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d <50	Kurang Berhasil



Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016, telah dilakukan pengukuran kinerja dengan hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥95
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	98,68				Sangat berhasil
2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	102,67				Sangat berhasil
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,87				Sangat berhasil
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100,13				Sangat berhasil
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	13	103,71				Sangat berhasil
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	2	92,91			Berhasil	
7.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertanian	7	78,06		Cukup berhasil		
8.	Meningkatnya kesempatan kerja	1	103,00				Sangat berhasil
9.	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	2	112,87				Sangat berhasil
10.	Menurunnya kemiskinan	1	100,40				Sangat berhasil
11.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	2	112,69				Sangat berhasil
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	140,98				Sangat berhasil
13.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	740,00				Sangat berhasil
14.	Meningkatnya kerukunan masyarakat	1	100,00				Sangat berhasil
15.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	1	100,29				Sangat berhasil
JUMLAH		39					



Pencapaian kinerja 15 sasaran tersebut, diolah dan disajikan dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016

No	Predikat	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Berhasil	13	86,66
2.	Berhasil	1	6,67
3.	Cukup Berhasil	1	6,67
4.	Kurang Berhasil	-	-
Jumlah		15	

C. Evaluasi Kinerja

1. Evaluasi Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 98,68 % dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 1 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016	
			Target	Realisasi (%) Capaian
1.	Predikat LAKIP Kabupaten	Predikat	A	Belum diketahui
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	Belum diketahui
Rata-rata capaian				Belum diketahui

Sumber data: Insoektorat dan DPKAD Kabupaten Sleman Tahun 2016

Realisasi Nilai LAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman adalah 77,89 atau dengan predikat penilaian “BB”, berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/377/AA.05/2017 tanggal 31 Januari 2017 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Perhitungannya target A, nilai 80 terealisasi 77,89, sehingga pencapaian kinerja sebesar 97,36%.



Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI menerima Penghargaan atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 (Predikat BB – Sangat Baik) dari MenPANRB Dr. Asman Abnur, S.E., M.Si., dan Piagam Penghargaan yang diterimakan

Sedangkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sleman adalah WTP, sehingga target indikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” pada sasaran sasaran ini pencapaian kinerjanya adalah 100%.



Bupati Sleman Drs. H. Sri Purnomo, MSI menerima Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (WTP), dari BPK Perwakilan Provinsi DIY

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	BB	Belum diketahui	A
2.	Opini BPK terhadap Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	Belum diketahui	WTP



Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
4. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp58.437.837.737,00 dari anggaran sebesar Rp74.214.239.597,00, atau 78,74%. Realisasi keuangan sebesar 98,68% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,68%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

- a. Komitmen pimpinan daerah, dan jajaran perangkat daerah dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi anggaran, serta pelaporan kinerja dan keuangan secara terpadu.
- b. Dukungan integrasi sistem dan teknologi informasi manajemen pemerintahan daerah berupa SIMRENDA (perencanaan), SIADINDA (keuangan), SIMASET (aset), SAKIP (akuntabilitas kinerja).
- c. Pembinaan dan pendampingan aparat pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan secara terus menerus.

2. Evaluasi Kinerja Sasaran 2: “Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 102,67% dan termasuk predikat **“sangat berhasil”**. Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.5 Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30	30,8	102,67

Sumber data: Dipenda Kabupaten Sleman Tahun 2016

Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2016 adalah sebesar 31,34%, dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\% = \frac{\text{Rp}717.776.305.390,43^*)}{\text{Rp}2.329.722.585.368,66^*)} \times 100\% = 30,8\%$$

*) Data merupakan angka *unaudited* oleh BPK.

Sumber utama PAD antara lain:

- Pajak Daerah, antara lain berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restaurant, dan Pajak Hiburan.
- Retribusi Daerah, antara lain dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Izin Gangguan, dan retribusi daerah lainnya.
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berasal dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah DIY, PD BPR Bank Sleman, dan PDAM Sleman
- Lain-lain PAD, meliputi Pendapatan Bunga Deposito, dan Pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) seperti RSUD Sleman, RSUD Prambanan, dan 25 Puskesmas.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	NA	30,8	35

Sasaran tersebut dicapai melalui program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp15.809.329.653,00 dari anggaran sebesar Rp17.188.430.473,00, atau 91,98%. Realisasi keuangan sebesar 91,98% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

- a. Potensi pajak dan retribusi daerah cukup memadai, karena wilayah Kabupaten Sleman merupakan pusat pertumbuhan properti, pusat wisata (hotel, restoran, obyek dan daya tarik wisata), dan pusat perguruan tinggi di DIY.
- b. Kerjasama yang cukup harmonis Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pemangku kepentingan pengelolaan pajak daerah seperti KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Notaris/PPAT, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan pemerintah desa.
- c. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak baru dan penagihan pajak secara intensif melalui jemput bola pada obyek pajak dan wajib pajak.
- d. Pelayanan pajak memanfaatkan teknologi informasi antara lain SIM-PAD, SIM-PBB, dan SISMIOP.
- e. Pemeriksaan pajak (uji kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak daerah) kepada wajib pajak daerah kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan pajak.
- f. Pelaksanaan bedah wajib pajak (mapping potensi, pembinaan untuk melaksanakan ketentuan perpajakan) bersama KPP Pratama.

3. Evaluasi Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,87 % dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,67	79,36	100,87

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman Tahun 2016

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada lokus 125 unit organisasi, terdiri 47 OPD, dan 78 UPT dihasilkan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2016 dari target sebesar 78,67 dapat terealisasi 79,36 atau mencapai 100,87%. Capaian IKM Pemerintah Kabupaten Sleman dihitung dari penjumlahan IKM seluruh unit organisasi dibagi jumlah unit organisasi ($9.920,61/125=79,36$).

Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara lengkap yang disusun sesuai peringkat, adalah sebagai berikut:



Tabel 3.8 Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016

No	Unit Organisasi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
1	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Turi	A	Sangat baik	87,50
2	Kecamatan Tempel	A	Sangat baik	85,78
3	Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan	A	Sangat baik	85,59
4	UPT Pemadam Kebakaran	A	Sangat baik	85,59
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	A	Sangat baik	85,45
6	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	A	Sangat baik	84,69
7	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	A	Sangat baik	84,63
8	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean	A	Sangat baik	83,96
9	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	A	Sangat baik	83,85
10	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I	A	Sangat baik	83,75
11	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	A	Sangat baik	83,35
12	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Pakem	A	Sangat baik	83,22
13	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik II	A	Sangat baik	82,89
14	Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel I	A	Sangat baik	82,89
15	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Gamping	A	Sangat baik	82,87
16	Kantor Arsip Daerah	A	Sangat baik	82,36
17	UPT Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan	A	Sangat baik	82,31
18	Balai Latihan Kerja	A	Sangat baik	82,30
19	Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I	A	Sangat baik	82,07
20	Sekretariat Daerah	A	Sangat baik	81,96
21	Kecamatan Ngemplak	A	Sangat baik	81,81
22	Kecamatan Turi	A	Sangat baik	81,57
23	Laboratorium Kesehatan	A	Sangat baik	81,54
24	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah III	A	Sangat baik	81,54
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	Sangat baik	81,51
26	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak I	A	Sangat baik	81,46
27	Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman	A	Sangat baik	81,39
28	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VIII	A	Sangat baik	81,31
29	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Cangkringan	B	Baik	81,20
30	Pusat Kesehatan Masyarakat Cangkringan	B	Baik	81,18
31	Badan Kepegawaian Daerah	B	Baik	81,04
32	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel	B	Baik	80,74
33	Badan Lingkungan Hidup	B	Baik	80,62
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	Baik	80,60
35	Kantor Kesatuan Bangsa	B	Baik	80,57
36	Pusat Kesehatan Masyarakat Tempel II	B	Baik	80,52
37	UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	B	Baik	80,50
38	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	B	Baik	80,48
39	Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan	B	Baik	80,46
40	Sub Terminal Agribisnis	B	Baik	80,44
41	Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II	B	Baik	80,35
42	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman	B	Baik	80,35
43	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	B	Baik	80,24
44	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan	B	Baik	80,18
45	Kantor Perpustakaan Daerah	B	Baik	80,18
46	Dinas Kesehatan	B	Baik	80,13
47	Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I	B	Baik	80,04
48	Kecamatan Ngaglik	B	Baik	79,98
49	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Prambanan	B	Baik	79,91
50	Pusat Kesehatan Masyarakat Turi	B	Baik	79,83
51	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati	B	Baik	79,75
52	Kecamatan Kalasan	B	Baik	79,72
53	Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	B	Baik	79,71
54	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah II	B	Baik	79,61
55	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan	B	Baik	79,52
56	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah I	B	Baik	79,43
57	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	B	Baik	79,37
58	Pusat Kesehatan Masyarakat Pakem	B	Baik	79,31
59	Satuan Polisi Pamong Praja	B	Baik	79,30
60	Kecamatan Mlati	B	Baik	79,23
61	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	B	Baik	79,22
62	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III	B	Baik	79,20



No	Unit Organisasi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
63	Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan	B	Baik	79,18
64	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak II	B	Baik	79,11
65	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok	B	Baik	79,09
66	Dinas Pendapatan Daerah	B	Baik	79,05
67	Kecamatan Sleman	B	Baik	78,98
68	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Seyegan	B	Baik	78,93
69	Unit Layanan Pengadaan	B	Baik	78,92
70	UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	B	Baik	78,91
71	Taman Pemakaman Umum	B	Baik	78,91
72	Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II	B	Baik	78,68
73	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	B	Baik	78,53
74	Kecamatan Minggir	B	Baik	78,49
75	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	B	Baik	78,46
76	Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan	B	Baik	78,43
77	Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II	B	Baik	78,37
78	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngaglik I	B	Baik	78,37
79	Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir	B	Baik	78,33
80	Kecamatan Moyudan	B	Baik	78,26
81	Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II	B	Baik	78,26
82	Kecamatan Seyegan	B	Baik	78,25
83	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VII	B	Baik	78,18
84	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan	B	Baik	78,05
85	Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan	B	Baik	78,05
86	UPT Pelayanan Pasar Kelompok III	B	Baik	78,05
87	UPT Peralatan, Perbekalan, dan Laboratorium	B	Baik	78,02
88	Kecamatan Berbah	B	Baik	78,00
89	Kecamatan Prambanan	B	Baik	77,99
90	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah IV	B	Baik	77,93
91	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B	Baik	77,87
92	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah	B	Baik	77,82
93	Museum Gunungapi Merapi	B	Baik	77,61
94	UPT Pelayanan Pasar Kelompok VI	B	Baik	77,59
95	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngaglik	B	Baik	77,54
96	Kecamatan Pakem	B	Baik	77,49
97	Kecamatan Godean	B	Baik	77,39
98	Kecamatan Depok	B	Baik	77,35
99	Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah	B	Baik	77,26
100	Rumah Susun Sederhana Sewa	B	Baik	77,22
101	UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal	B	Baik	77,18
102	Kecamatan Cangkringan	B	Baik	77,10
103	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah	B	Baik	77,09
104	UPT Pelayanan Pasar Kelompok IV	B	Baik	76,98
105	Inspektorat Kabupaten	B	Baik	76,94
106	UPT Pengelolaan Stadion Maguwoharjo	B	Baik	76,78
107	Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I	B	Baik	76,72
108	Dinas Pasar	B	Baik	76,59
109	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Minggir	B	Baik	76,41
110	Sekretariat DPRD	B	Baik	76,23
111	Kecamatan Gamping	B	Baik	76,16
112	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah V	B	Baik	76,02
113	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	Baik	75,86
114	UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak	B	Baik	75,85
115	UPT Pelayanan Pasar Kelompok V	B	Baik	75,83
116	Sanggar Kegiatan Belajar	B	Baik	75,70
117	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	B	Baik	75,68
118	Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu	B	Baik	75,38
119	Taman Kuliner Condongcatur	B	Baik	75,35
120	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah VI	B	Baik	75,25
121	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	B	Baik	75,18
122	UPT Pelayanan Pasar Kelompok I	B	Baik	75,17
123	UPT Pelayanan Pasar Kelompok II	B	Baik	74,81
124	UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah	B	Baik	73,46
125	UPT Pelayanan Pasar Kelompok VII	B	Baik	71,94



No	Unit Organisasi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan
	Jumlah nilai seluruh unit organisasi			9.920,61
Nilai rata-rata				79,36

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman Tahun 2016

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,61	79,36	79

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
7. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
9. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
12. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
13. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
15. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
16. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
17. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
19. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Sleman sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

20. Program Penegakan Hukum
21. Program Kerjasama Pembangunan
22. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
23. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
24. Program Pengembangan Data/Informasi
25. Program Pendidikan Kedinasan
26. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah
27. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
28. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek
29. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
31. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp165.231.562.797,00 dari anggaran sebesar Rp191.572.729.073,00, atau 86,27%. Realisasi keuangan sebesar 86,27% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,87%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Loket Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

1. Pembinaan dan evaluasi kinerja pelayanan publik melalui rapat, surat edaran, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2016, dari 25 OPD dan 17 UPT yang menyampaikan dokumen laporan, telah ditetapkan tiga terbaik yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Sleman.
2. Mengirimkan 14 proposal dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Mengembangkan media Pelayanan Pengaduan Publik berbasis *smartphone* melalui aplikasi "Lapor Sleman".

Prestasi Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain:

- a. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu termasuk kategori A, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk kategori B, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi 59 daerah (20 Kabupaten dan 39 Kota) *Role Model* Pelayanan Publik atas Pelayanan RSUD, PTSP, dan Disdukcapil.

- b. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia, mencapai nilai rata-rata 62,57 dengan zona kepatuhan warna kuning.



Penghargaan *Role Model* Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori A dari KemenPANRB bagi RSUD Sleman dan BPMPPT Kabupaten Sleman

4. Evaluasi Kinerja Sasaran 4: “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,13% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,47	74,57*)	100,13

*) angka sementara

Sumber data: Bappeda dan Dinkes Kabupaten Sleman Tahun 2016

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, dan kesejahteraan penduduk pada umumnya. UHH Kabupaten Sleman tahun 2016 relatif baik apabila dibandingkan UHH Propinsi DIY yang mencapai 74,75.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	NA	74,57*)	74,49

*) angka sementara

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
15. Program Keluarga Berencana
16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
17. Program Pelayanan Kontrasepsi
18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
19. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
20. Program Perencanaan Sosial Budaya.



Posyandu Lansia



Pemeriksaan Ibu Hamil di Puskesmas

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp340.843.719.578,00 dari anggaran sebesar Rp370.887.130.119,00, atau 91,90%. Realisasi keuangan sebesar 91,90% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,13%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kualitas kesehatan masyarakat antara lain:

- a. Cakupan pelayanan kesehatan yang terdiri 67 indikator mencapai sebesar 80,60%.



- b. Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan mencapai 87,13 % dari (940.257 jiwa dari 1.079.053 jiwa)
- c. Peran serta pengelola fasilitas kesehatan dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan, serta peran swasta, masyarakat, kader kesehatan dalam mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS).

Prestasi pembangunan kesehatan:

- a. Puskesmas Mlati II meraih Juara II Tingkat Nasional Puskesmas Berprestasi
- b. Pemerintah Desa Banyuraden, Gamping meraih Juara III Nasional Lomba Tanaman Obat Keluarga (Toga)
- c. Semua Puskesmas telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan, meliputi Kategori Utama: 2 Puskesmas; Kategori Madya: 8 Puskesmas; Kategori Dasar: 15 Puskesmas
- d. TK Al Azhar, Sleman meraih Juara I Tingkat Nasional Lomba Sekolah Sehat (LSS).

5. Evaluasi Kinerja Sasaran 5: “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan” dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja mencapai 103,71% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 5 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Partisipasi Kasar	%			
	PAUD	%	78,20	78,18	99,97
	SD	%	≥100	116,90	116,90
	SMP	%	≥100	111,71	111,71
	SMA/K	%	86,45	87,45	101,16
2	Angka Partisipasi Murni	%			
	SD	%	≤100	103,96	103,96
	SMP	%	83,97	85,11	101,36
	SMA/K	%	58,96	60,36	102,37
3	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	10,33	10,30	99,71
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,71	15,77	100,38
5	Rata-rata Nilai Ujian	Nilai			
	SD	Nilai	236,17	236,16	100,00
	SMP	Nilai	261,65	261,17	99,82

	SMA	Nilai	335,25	365,17	108,92
	SMK	Nilai	252,93	257,94	101,98
Rata-rata capaian					103,71

Sumber data: Disdikpora Kabupaten Sleman Tahun 2016

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah PAUD



Gelar Kreatifitas
Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Sekolah PAUD, realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dari target 78,20% terealisasi 78,18%, atau mencapai 99,97%.

b. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dari target ≥ 100 dengan realisasi 116,90%. APK sebesar 116,90% ini lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi DIY yang hanya mencapai 109,22%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari target ≤ 100 terealisasi 103,96%, sedangkan APM yang dicapai Provinsi DIY adalah sebesar 96,71%.

c. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs sebesar 111,71%, dari target $\geq 100\%$ atau tercapai 111,71%. Capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan APK Provinsi DIY yang mencapai 109,22%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mencapai 101,36 %, dari target sebesar 83,97% tercapai 85,11%. APM ini lebih tinggi dibandingkan APM Provinsi DIY yang mencapai 84,34 %.

d. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMA/MA

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/SMK/MA sebesar 101,16%, dari target 86,45% tercapai 87,45%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA mencapai 102,37 %, dari target 58,96% tercapai 60,36%.

e. Rata-Rata Lama Sekolah



Rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 terealisasi 10,30 tahun dari target 10,33 tahun, sehingga capaiannya sebesar 99,71%. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah tingkat Pemda DIY yaitu 8,84 tahun.

f. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016 dari target 15,71 tahun terealisasi 15,77 tahun, sehingga capaiannya sebesar 100,38%.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti program pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

g. Rata-rata Nilai Ujian

Ujian merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan. Pada tahun 2016, jenjang pendidikan SD/MI menerapkan ujian sekolah, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK menerapkan ujian nasional.

1) Ujian SD

Capaian nilai ujian SD sebesar 100,00%, dari target nilai 236,17 terealisasi 236,16. Nilai ujian ini lebih tinggi dibandingkan nilai DIY sebesar 231,75.

2) Ujian SMP

Capaian nilai ujian SMP sebesar 99,82%, dari target nilai 261,65 terealisasi 261,17. Nilai ujian ini lebih tinggi dibandingkan nilai DIY sebesar 255,81.

3) Ujian SMA

Capaian nilai ujian SMA sebesar 108,92%, dari target nilai 335,25 terealisasi 365,17. Nilai ujian ini lebih tinggi dibandingkan nilai DIY sebesar 357,54.

4) Ujian SMK

Capaian nilai ujian SMK sebesar 100,32%, dari target nilai 252,93 terealisasi 253,75. Nilai ujian ini lebih tinggi dibandingkan nilai DIY sebesar 257,94.



Komitmen
Pemerintah
Kabupaten Sleman
terhadap
Peningkatan
Kualitas Pendidikan

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1	Angka Partisipasi Kasar	%			
	PAUD	%	78,17	78,18	78,35
	SD	%	116,81	116,90	≥100
	SMP	%	111,70	111,71	≥100
	SMA/K	%	88,69	87,45	-
2	Angka Partisipasi Murni	%			
	SD	%	103,20	103,96	≤100
	SMP	%	83,96	85,11	84,50
	SMA/K	%	58,95	60,36	-
3	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	10,30	10,30	10,48
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	NA	15,77	15,88
5	Rata-rata Nilai Ujian	Nilai			
	SD	Nilai	NA	236,16	236,22
	SMP	Nilai	NA	261,17	261,71
	SMA	Nilai	NA	365,17	335,30
	SMK	Nilai	NA	257,94	252,97

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru
7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
9. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu
10. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
11. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
12. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
13. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
14. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
15. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
17. Program Pengembangan Budaya Baca
18. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
19. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp81.552.002.023,00 dari anggaran sebesar Rp91.083.219.175,00, atau 89,54%. Realisasi keuangan sebesar 89,54% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,71%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- a. Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Jumlah sekolah di Kabupaten Sleman sampai tahun 2016 adalah:
 - 1) TK/PAUD berjumlah 559 sekolah, terdiri 5 sekolah negeri dan 554 sekolah swasta, dengan jumlah bangunan 1.608 unit, dalam ruang kelas kondisi baik 1.534 unit (95,40%) kondisi rusak ringan 67 Unit (4,17%), dan kondisi rusak berat 7 (0,44%).
 - 2) SD/MI berjumlah 534 sekolah, terdiri 379 sekolah negeri dan 155 sekolah swasta, dengan jumlah bangunan 3.828 unit, dalam kondisi baik 3.317 unit (86,65%) kondisi rusak ringan 450 Unit (11,76%), dan kondisi rusak berat 61 (1,59%).
 - 3) SMP/MTs berjumlah 137 sekolah, terdiri 65 sekolah negeri dan 72 sekolah swasta dengan jumlah bangunan 1.544 unit, dalam kondisi baik 1.440 unit



- (93,26%) kondisi rusak ringan 76 Unit (4,92 %), dan kondisi rusak berat 28 (1,81%).
- 4) SMA/SMK/MA berjumlah 118 sekolah, terdiri 30 sekolah negeri dan 88 sekolah swasta dengan jumlah bangunan 1.416 unit, dalam kondisi baik 1.335 unit (94,28%) kondisi rusak ringan 74 Unit (5,23%), dan kondisi rusak berat 7 (0,49%).
- b. Keberadaan guru sekolah meliputi:
 - 1) Guru TK/PAUD berjumlah 2.265 orang, meliputi 305 orang guru negeri dan 1.363 orang guru swasta, dengan kualifikasi kelayakan mengajar 71,52%.
 - 2) Guru SD/MI berjumlah 6.093 orang, meliputi 2.918 orang guru negeri dan 3.175 orang guru swasta, dengan kualifikasi kelayakan mengajar 87,71%.
 - 3) Guru SMP/MTs berjumlah 3.382 orang, meliputi 1.406 orang guru negeri dan 1.273 orang guru swasta, dengan kualifikasi kelayakan mengajar 90,18%.
 - 4) Guru SMA/SMK/MA berjumlah 1.226 orang, meliputi 550 orang guru negeri dan 676 orang guru swasta, dengan kualifikasi kelayakan mengajar 94,75%.
 - c. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan BOSDA Propinsi dan BOSDA Kabupaten untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta yang digunakan pembelian buku, honorarium guru dan pegawai tidak tetap, evaluasi pembelajaran, alat tulis kantor, langganan jasa dan pemeliharaan ringan sarana prasarana.
 - d. Penyediaan anggaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah (JPPD) untuk siswa keluarga miskin pada jenjang SMA dan SMK terealisasi sebesar Rp 20.877.750.000 untuk 19.879 siswa.
 - e. Pendampingan kegiatan penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD.
 - f. Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam bidang pengembangan kualitas belajar mengajar dan peningkatan kualifikasi pendidik, seperti proses perolehan sertifikat pendidik oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (untuk DIY ditetapkan UNY), dan melibatkan akademisi dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
 - g. Pembinaan kreativitas siswa baik akademik (Olimpiade Sains, karya tulis ilmiah remaja), maupun non akademik (seni, olah raga).
 - h. Pemberdayaan kelompok kerja kepala sekolah (SD) dan musyawarah kerja kepala sekolah (SMP) dalam membangun kemitraan dan pendampingan siswa terutama menghadapi sukses ujian nasional, mengatasi kenakalan siswa, dan membangun karakter siswa.
 - i. Pembinaan karakter siswa kerjasama dengan AAU terhadap 100 siswa berpotensi berperilaku menyimpang diasramakan selama 6 hari.
 - j. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO pada 8 SMK Negeri, 9 SMK swasta.

Prestasi dan penghargaan di bidang pendidikan antara lain:

1. Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Pengelola Pendidikan Terbaik di Daerah.
2. Penghargaan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia kepada Drs. H. Sri Purnomo, MSI atas perhatian dan komitmen terhadap guru, PGRI, dan pendidikan di Kabupaten Sleman.



Penghargaan dari Mendikbud kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Pengelola Pendidikan Terbaik di Daerah, serta Penghargaan dari PB PGRI kepada Bupati Sleman atas komitmennya terhadap guru dan kemajuan pendidikan

6. Evaluasi Kinerja Sasaran 6: “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 92,91% dan termasuk predikat “**berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,4	5,31	98,33
2.	Indeks Gini	Indeks	≤0,40	0,45	87,50
Rata-rata capaian					92,91

Sumber data: Bappeda Kabupaten Sleman Tahun 2016

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 terealisasi 5,31% dari target 5,40%, sehingga capaiannya sebesar 98,33%. Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan

nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000, sehingga pengaruh perubahan harga (inflasi) sudah dihilangkan. Dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh merupakan pertumbuhan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan dan bukan disebabkan oleh perubahan harga. Selama 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kinerja sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman. Sektor tersier masih merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sleman yang merupakan daerah penyangga bagi Yogyakarta, dan sebagai daerah tujuan wisata serta tujuan pendidikan.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio dari target sebesar $\leq 0,40$, terealisasi 0,45, sehingga capaiannya adalah sebesar 87,50%. Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Realisasi indeks gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Sleman berada pada kriteria ketimpangan sedang.



Geliat usaha pelaku
UMKM di wilayah
Kabupaten Sleman

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.15 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,28	5,31	5,65
2.	Indeks Gini	Indeks	0,40	0,45	≤0,40

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
9. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
10. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp8.257.210.953,00 dari anggaran sebesar Rp9.165.761.000,00, atau 90,09%. Realisasi keuangan sebesar 90,09% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 92,91%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Perkembangan usaha sektor perdagangan, hotel, restoran, jasa lainnya, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cukup baik, karena Kabupaten Sleman merupakan daerah tujuan pendidikan tinggi dan wisata.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian dan situasi keamanan yang kondusif.



7. Evaluasi Kinerja Sasaran 7: “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian” dengan 7 (tujuh) indikator kinerja mencapai 78,06% dan termasuk predikat “**cukup berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 7 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,63	1,67	102,45
2.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,00	2,05	102,50
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.117.000	5.321.038	129,24
4.	Nilai Ekspor	US\$	42.000.000,00	33.488.303,36	79,73%
5.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	2,7%	2,79%	103,30%
6.	Nilai Tukar Petani	Nilai	111,65	108,23	96,97
7.	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan	%	3,26	(2,21)	(67,87)
Rata-rata capaian					78,06

Sumber data: Disbudpar, Disperdagkop, DP2K, dan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun 2016

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Lama Tinggal Wisatawan Nusantara**

Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dari target 1,63 hari terealisasi 1,67 hari atau mencapai 102,45%.

b. **Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara**

Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dari target 2,00 hari terealisasi 2,05 hari atau mencapai 102,50%.

Data Lama Tinggal Wisatawan diperoleh dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berdasar jumlah rata-rata tamu menginap di hotel berbintang yang ada di Kabupaten Sleman, dengan rumus jumlah hari lama tinggal semua wisatawan dibagi jumlah tamu yang menginap dikalikan 100%.



Tebing Breksi, salah satu obyek wisata baru di wilayah Kabupaten Sleman yang mampu menarik perhatian wisatawan

c. **Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 dari target 4.117.000 orang terealisasi 5.321.038 orang, atau mencapai 129,24%.

Wisatawan yang berkunjung 95,33% merupakan wisatawan nusantara. Wisatawan nusantara yang berkunjung mengalami kenaikan sebesar 2,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar 4,49% (248.363) dibanding tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja kepariwisataan diantaranya adalah:



Salah satu Desa Wisata di wilayah Kabupaten Sleman

- a. Kegiatan promosi wisata secara rutin melalui pameran, travel dialog, promosi lewat media dan lain-lain;
- b. Penyelenggaraan beberapa event pariwisata dan budaya.
- c. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata cukup baik, termasuk pengembangan “desa wisata”.

Prestasi sektor kepariwisataan antara lain:

1. Kabupaten Terbaik ke-2 Kategori Pariwisata (setelah Kabupaten Badung Bali) dalam ajang Indonesia *Attractiveness* Tahun 2016, yang diselenggarakan oleh Fountier Consulting Group dengan Tempo Media Group
2. Indeks Pariwisata Indonesia urutan ke-4 sesudah Denpasar, Surabaya, dan Batam, sebagai hasil kerja sama antara Litbang Kompas Kementerian Pariwisata dengan Travel & Tourism Competitif Indeks.
3. Kabupaten Terbaik dalam Peringkat Top Ten Indeks Pariwisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata RI.



Berbagai Penghargaan di bidang kepariwisataan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman

d. **Nilai Ekspor**

Realisasi ekspor dari target US\$ 42.000.000,00 terealisasi US\$ 33.488.303,36 atau mencapai 79,73%.

Nilai realisasi ekspor berdasar data yang tertulis dalam Surat Keterangan Asal (SKA) dari Diperindag Pemda DIY selaku instansi penerbit SKA. Namun apabila berdasarkan pengumpulan data langsung dari perusahaan yang SKAnya diurus di luar Pemda DIY sebesar nilai ekspor sebesar US\$. 55.582.659,86. Komoditas ekspor Kabupaten Sleman antara lain pakaian jadi dan tekstil, sarung tangan kulit, sarung tangan sintetis, kerajinan, furniture (mebel kayu), dan sebagainya.

e. **Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri**

Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri dari target 2,7% terealisasi 2,79% atau mencapai 103,30%. Angka ini diperoleh dari perbandingan nilai produksi tahun 2016 sebesar Rp 3.407.567.027.000 dengan tahun 2015 sebesar Rp 3.315.117.839.000.



Kegiatan industri di wilayah Kabupaten Sleman

Faktor yang mempengaruhi kinerja sektor perindustrian, dan perdagangan antara lain:

- a. Peningkatan produksi industri karena bahan baku lokal mudah diperoleh, penggunaan teknologi yang tepat guna, dan stabilitas produksi perusahaan akibat penyesuaian upah pekerja/Upah Minimum Kabupaten.
- b. Nilai ekspor mengalami penurunan akibat pindahnya perusahaan produk ekspor ke luar wilayah Sleman dan dipengaruhi kebijakan negara importir yang tidak lagi menggunakan dokumen SKA sebagai syarat ekspor, akibatnya data ekspor komoditas tidak tercatat di Disperindag, Pemda DIY.

Prestasi sektor perindustrian, dan perdagangan:

- Penghargaan “Cinta Karya Anak Bangsa” terhadap Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dari Kementerian Perindustrian.

f. **Nilai Tukar Petani (NTP)**

Capaian NTP (angka sementara) Kabupaten Sleman dari target nilai 111,65 terealisasi senilai 108,23 atau 96,97%. Apabila dibandingkan dengan NTP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (sampai dengan Desember 2016) yang mencapai 103,40 dan NTP nasional yang mencapai 101,49, NTP Kabupaten Sleman memiliki kesejahteraan yang lebih baik. NTP tidak tercapai menurut analisa disebabkan kenaikan harga produk pertanian yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan rumah tangga, biaya produksi, dan penambahan barang modal usaha tani. Dampak iklim kemarau basah sepanjang tahun 2016



mengakibatkan kenaikan biaya produksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang banyak menyerang lahan pertanian yang curah hujannya panjang. Sementara itu komoditas peternakan dan perikanan, kenaikan harga pakan mengakibatkan meningkatnya indeks harga yang dibayar petani. Sedangkan pada sisi indeks kebutuhan rumah tangga, kenaikan indeks harga yang dibayar petani disebabkan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup seperti konsumsi rumah tangga yang terdiri dari bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, transportasi dan komunikasi.

Nilai Tukar petani (NTP) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani sebagai hasil pembangunan bidang pertanian. NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. BPS menyusun definisi NTP sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Perhitungan indeks yang diterima dilakukan dengan menggunakan harga produk yang dihasilkan oleh petani pada tingkat produsen (petani). Harga pada tahun 2012 dijadikan sebagai pembanding baku dengan nilai 100. Indeks bayar adalah komponen yang digunakan untuk menghitung harga yang dibayar petani meliputi konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Konsumsi rumah tangga terdiri dari bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, transportasi dan komunikasi. Biaya produksi meliputi bibit, obat-obatan dan pupuk, transportasi dan komunikasi, sewa lahan, pajak dan lainnya, penambahan barang modal dan upah buruh tani. Perhitungan NTP per komoditas disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Komponen Perhitungan NTP per Komoditas Tahun 2015-2016

Komoditas		2015	2016
Tanaman Pangan	It	132.51	140.89
	Ib	120.94	130.92
	IKRT	121.55	131
	IBPPBM	117.41	130.4
NTP		109.57	107.61
Hortikultura	It	129.45	133.55
	Ib	124.34	131.65
	IKRT	124.37	132.62



	IBPPBM	124.23	127.69
	NTP	104.12	101.45
Perkebunan	It	144.92	168.59
	Ib	121.1	131.87
	IKRT	124.06	135.17
	IBPPBM	116.43	125.9
	NTP	119.67	127.84
Peternakan	It	145.56	151.82
	Ib	123.04	143.88
	IKRT	124.7	135.36
	IBPPBM	121.37	152.44
	NTP	118.31	105.52
Perikanan	It	133.34	126.92
	Ib	120.34	124.21
	IKRT	125.79	129.85
	IBPPBM	113.61	117.85
	NTP	110.71	102.18
Total	It	135.91	144.48
	Ib	121.76	133.71
	NTP	111.54	108.23

Sumber data: DP2K Kabupaten Sleman Tahun 2016

g. **Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan.**

Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dari target sebesar 3,260%, terealisasi -2,21% atau mencapai -67,87%. Penghitungan persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan disajikan dalam tabel.

Tabel 3.18 Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Capaian (%)
1.	Pertanian & Perkebunan			-16,23
	a. Padi (ton)	326.819	324.169	-0,81
	b. Jagung (ton)	41.619	22.574	-45,76
	c. Kedelai (ton)	199	88,00	-55,78
	d. Salak pondoh (kw)	699.831	730.053	4,32
	e. Jambu Dalhari (kw)	19.664,74	24.262	23,38
	f. Bunga krisan (tangkai)	4.563.849	3.622.771	-20,62
	g. Cabe (ton)	4.703,40	5.620,70	19,50
	h. Kelapa (kw)	76.473,70	73.952,63	-3,30
	i. Tembakau rakyat (kw)	7.500	956,70	-87,24

	j. Tebu (kw)	33.950	33.323,70	-1,84
	k. Kopi (kw)	372.5	333,67	-10,42
2.	Peternakan			0,46
	a. Satuan ternak	88.082	88.297	0,24
	b. Telur (kg)	16.887.070	16.938.021	0,30
	c. Susu sapi (kg)	3.710.266	3.741.750	0,85
3.	Perikanan			9,15
	a. Ikan konsumsi (ton)	36.627,00	42.875,20	17,06
	b. Benih ikan (ekor)	1.021.216.850	1.082.030.340	5,95
	c. Ikan hias (ekor)	16.300.500	17.024.200	4,44
Rata-rata peningkatan				-2,21

Sumber data: DP2K Kabupaten Sleman Tahun 2016

Pencapaian produksi pertanian dan perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komoditas pertanian

- 1) Produksi padi mengalami penurunan sebesar 0,81 %, dari 326.819 ton pada tahun 2015 menjadi 324.169 ton pada tahun 2016. Produktifitas padi sawah juga menurun 65,53 kw/ha menjadi 61,82 kw/ha pada tahun 2016.



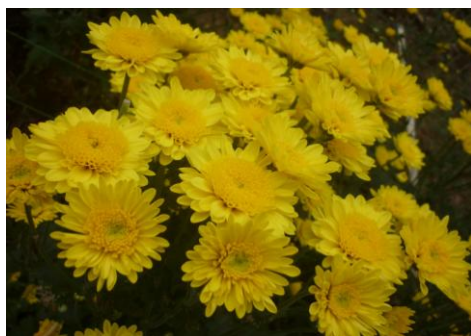
Panen raya padi bersama Menteri Pertanian RI

Hal ini diengaruhi curah hujan yang tinggi disertai angin mengakibatkan tanaman padi roboh, tingkat kehilangan panen tinggi, dan serangan hama dan penyakit tanaman meningkat. Pemerintah telah berupaya mengatasi serangan hama dan penyakit padi melalui bantuan pestisida yang digunakan pada saat persemaian benih sehingga mampu menekan kerugian kurang dari 5 %, karena kerugian akibat hama biasanya mencapai 25%.

- 2) Produksi jagung menurun dari 41.619 ton menjadi 22.574 ton atau -45,76%. Produktifitas juga mengalami penurunan dari sebesar 77,20 kw/ha menjadi 69,95 kw/ha. Luas tanaman jagung tahun 2016 menurun dari 5.391 ha menjadi seluas 3.227 ha. Musim hujan sepanjang tahun 2016 tidak menguntungkan budidaya jagung karena tanaman jagung cocok di tanam pada lahan kering dan lahan sawah di musim kemarau.
- 3) Produksi kedelai juga menurun dari 199 ton menjadi 88,00 ton atau terjadi penurunan sebesar 55,78%. Produktifitas kedelai menurun dari 15,31 kw/ha menjadi 15,24 kw/ha. Luas panen berkurang dari 130 ha menjadi 58 ha. Hal

ini disebabkan karena adanya musim kemarau basah sehingga banyak terjadi genangan. Tanaman kedelai merupakan tanaman yang tidak tahan genangan, untuk pertumbuhannya tanaman kedelai yang merupakan tanaman sub tropis membutuhkan penyinaran matahari lebih dari 12 jam.

- 4) Produksi salak pondoh tahun 2016 meningkat dari 699.831 kwintal pada tahun 2015 menjadi 730.053 kwintal atau meningkat 4,32%, yang dipengaruhi oleh produktifitas mengalami kenaikan dari 251,15 kw/ha menjadi 258,36 kw/ha, dan jumlah rumpun salak pondoh yang bertambah dari 5.822.820 rumpun menjadi 5.875.497 rumpun. Komoditas salak pondoh merupakan komoditas unggulan yang cocok di tanam di wilayah lereng Gunung Merapi yaitu kecamatan Turi, Tempel dan Pakem. Produksi
- 5) Produksi jambu dalhari mengalami peningkatan sebesar 23,38%, dari 19.664,74 kwintal pada tahun 2015 menjadi 24.262 kwintal pada tahun 2016, yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah tanaman dari 23.932 pohon menjadi 27.089 pohon dan peningkatan produktifitas dari 105,85 kw/ha menjadi 108,58 kw/ha. Komoditas jambu dalhari merupakan komoditas unggulan dari wilayah Kecamatan Berbah dan Prambanan.
- 6) Produksi bunga krisan tahun 2016 ini hanya mencapai 3.622.771 tangkai menurun sebesar 20,62% dibandingkan tahun 2015 yang mampu menghasilkan 4.563.849 tangkai. Hal ini disebabkan luas tanam menurun dari 16.376 m² menjadi 8.610 m² dan masa tanam berkurang dari 3-4 kali setahun menjadi 2 kali setahun karena musim hujan sepanjang tahun, padahal bunga krisan mampu berbunga dengan baik dengan pencahayaan matahari lebih dari 13 jam.



Tanaman Krisan

Walaupun petani tetap berupaya menjaga produksi melalui teknik pencahayaan buatan menggunakan lampu listrik meskipun menambah pengeluaran biaya produksi dan menerapkan kubung paranet untuk mengatur pencahayaan.

- 7) Produksi Cabe mencapai 5.620,70 ton atau naik sebesar 19,50% dari produksi tahun 2015 yang mencapai 4.703,40 ton. Luas panen tahun 2015 sebesar 1.230 ha tahun 2016 naik menjadi 1.286 ha. Luas tanam dan luas panen yang meningkat 4,55 % atas dukungan APBN untuk pengembangan

cabe merah seluas 20 ha dan pengembangan cabe rawit seluas 75 ha. Kendala penanaman cabe adalah tingginya curah hujan pada saat tanaman berbuah lebat sehingga banyak tanaman tergenang air dan terserang penyakit layu, sehingga produktivitas cabe hanya berkisar 3-5 ton/ha menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6 – 8 ton /ha.



Panen Raya Cabe Bersama Bupati Sleman, serta Lahan Budidaya Cabe Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura di Jodag, Sumberadi, Mlati, Sleman

- 8) Capaian produksi kelapa sebesar 73.952,63 kwintal atau 96,70% dari produksi tahun 2015 yang berhasil mencapai 76.473,70 kw. Produksi kelapa ini tidak mencapai target yang ditetapkan atau mengalami penurunan sebesar 3,30%. Produktifitas mengalami penurunan dari pencapaian 16,14 kw/ha tahun 2015 menjadi 15,65 kw/ha tahun 2016. Produksi Kelapa dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yang disebabkan musim hujan yang ekstrim yang menyebabkan kerontokan pada calon bunga, dan populasi pohon kelapa berkurang karena banyak pohon kelapa yang ditebang untuk jual kayu batangnya dan lahan digunakan untuk permukiman.
- 9) Capaian produksi tembakau rakyat sebesar 956,70 kwintal pada tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 87,24% menjadi sebesar 7.500 kwintal, yang pengaruhi luas panen menurun dari 1.320 ha tahun 2015 menjadi 956,70 ha tahun 2016, dan produktifitas juga menurun dari 6,79 kw/ha menjadi 6,31. Hal ini disebabkan karena musim hujan yang terus menerus menyebabkan kerusakan pada tanaman tembakau, rendemen sangat turun, serta sebagian lahan tanaman tembakau tidak dapat dipanen karena ongkos tenaga tidak sesuai dengan hasil dari penjualan tembakau rakyat.
- 10) Produksi tebu tahun 2016 sebesar 33.323,70 kwintal atau mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mampu mencapai 33.950 kwintal atau terjadi penurunan sebesar 1,84%. Luan panen tahun 2016 hanya mencapai 1.028,61 ha menurun dibandingkan luas panen tahun 2015 yang mencapai 1.220,65 ha. Walaupun demikian produktifitas tebu mengalami kenaikan dari 31,68 kw/ha menjadi sebesar 32,40 kw/ha.

11) Produksi kopi mengalami penurunan dari 372,5 kw menjadi 333,67 kwintal. Luas panen tahun 2016 mengalami penurunan dari 84 ha menjadi 78,70 ha. Produktifitas juga turun dari 5,23 kw/ha menjadi 4,05 kw/ha. Hal ini disebabkan karena musim hujan yang ekstrim mengakibatkan bunga calon buah banyak yang gugur.

b. Komoditas peternakan

Pencapaian peningkatan produksi hasil peternakan sebesar 0,46 %. Pencapaian target ini disebabkan karena pencapaian satuan ternak yang semula 88.082 menjadi 88.297 di tahun 2016,

peningkatan produksi telur dari 16.887.070 kg menjadi 16.938.021 kg atau terjadi peningkatan produksi sebesar 0,30%, peningkatan produksi susu sapi dari 3.710.266 kg menjadi 3.741.750 kg atau terjadi peningkatan sebesar 0,85% di tahun 2016.



Pemeriksaan kesehatan hewan

c. Komoditas perikanan



Penyerahan ikan bantuan Presiden RI untuk masyarakat Sleman dalam rangka gerakan memasyarakatkan makan ikan

Peningkatan produksi mencapai 9,15 % di tahun 2016 dari target yang ditetapkan sebesar 9%. Pencapaian ini didasarkan pada tercapainya peningkatan produksi ikan konsumsi dari 36.627 ton menjadi 42.875,20 ton tahun 2016 atau meningkat 17,06%.

Peningkatan benih ikan dari 1.021.216.850 ekor naik sebesar 5,95% menjadi 1.082.030.340 ekor dan peningkatan ikan hias dari 16.300.500 ekor menjadi 17.024.200 ekor.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja bidang pertanian adalah:

a. Penerapan teknologi secara tepat seperti penerapan *Good Agriculture Practises* (GAP) bagi kelompok tani bermanfaat meningkatkan kemampuan petani dalam



melakukan budidaya secara baik dan benar sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

- b. Penerapan teknologi mina padi kolam dalam dan UGADI (Udang Galah Bersama Padi) yang saat ini gencar dilaksanakan menjadi salah satu teknologi yang cukup diminati di masyarakat, karena teknologi ini mampu meningkatkan pendapatan petani pembudidaya ikan.
- c. Peran serta masyarakat berorganisasi dalam kelompok tani yang jumlahnya mencapai 3.229 kelompok, terdiri dari 1.296 kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura, 871 kelompok tani peternakan, 610 kelompok tani perikanan, 176 kelompok tani kehutanan dan 176 kelompok kelompok tani perkebunan.
- d. Penyediaan sumberdaya organisasi dan manusia yaitu 8 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang didukung 76 orang penyuluh pertanian lapangan, penyuluh ahli 19 orang.
- e. Pelayanan kesehatan hewan melalui 12 Poskeswan dengan tenaga medik veteriner sebanyak 18 orang, dan paramedik 12 orang didukung kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan.
- f. Peningkatan pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan, pemantauan dan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan alat reproduksi yang secara intensif dilakukan oleh petugas serta peningkatan jumlah pemotongan hewan ternak
- g. Peningkatan teknologi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan dari budidaya hingga pasca panen dan pengolahan hasil
- h. pendampingan yang intensif dari petugas kepada kelompok perikanan melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan, terpenuhinya sarana prasarana budidaya perikanan seperti sumur, kolam ikan, peralatan perikanan dan sarana penunjang lainnya antara lain bantuan benih, bantuan calon induk, dan bantuan bahan baku pakan mandiri.
- i. Pembangunan infrastruktur pertanian berupa dam parit perkebunan (1 unit), peningkatan kapasitas jalan usaha tani (8 lokasi) jaringan irigasi tersier (27 lokasi), bangunan lumbung (3 unit) , air tanah dangkal (8 lokasi), embung (6 lokasi), dam parit (4 lokasi),
- j. Alokasi bantuan barang berupa alat pengayak pupuk organik (12 paket), sumur produksi kelompok (10 unit), kolam penampungan hasil panen (12 unit), mesin cetak pelet (1 unit), traktor dan hitch II (10 unit), cultivator (28 unit), perajang tembakau (10 unit), sumur ladang (12 unit), pompa air dan kelengkapannya (4 unit), pengadaan sapi integrasi tembakau ternak (30 ekor), hand sprayer (6 unit), benih padi (98 kelompok), traktor roda 2 sistem singkal (5 unit), traktor rotari (5 unit), pedal thresher (10 unit), terpal (20 unit).



Hambatan:

- a. Musim hujan yang terus menerus mengakibatkan gangguan pada proses pembungaan/pembuahan dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan
- b. Kenaikan harga produk pertanian yang lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan rumah tangga, biaya produksi usaha pertanian, dan penambahan barang modal sektor pertanian mengakibatkan Nilai Tukar Petani (NTP) menurun sehingga petani kesejahteraan ekonominya juga menurun.

Strategi pemecahan masalah:

Pemecahan hambatan, masalah pembangunan pertanian dilakukan melalui pemberdayaan petani melalui:

- a. penguatan kelembagaan melalui peningkatan kelas kelompok tani dan peningkatan usaha melalui sertifikasi produk.
- b. peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan, kursus, magang dan Sekolah Lapang,
- c. peningkatan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat baik dari budidaya, pasca panen, dan pengolahan.
- d. penerapan Standar Operasional Prosedur baik untuk budidaya maupun pasca panen, seperti komoditas tembakau, kopi, cabe, salak pondoh dan jambu dalhari
- e. pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman contohnya melalui gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman
- f. Penanganan dampak perubahan iklim melalui pengaturan pola tanam.
- g. Fasilitasi dan optimasi Sarana prasarana Tanaman pangan dan hortikultura (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumberdaya air, dan permodalan)

Prestasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan Tingkat Nasional 2016:

- a. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN), dari 8 (delapan) kategori diperoleh prestasi 4 (empat) kategori antara lain:
 - 1) Kategori Pelayan Ketahanan Pangan (Peneliti) atas nama Prof. Dr. Ir. Mary Astuti, M.S, Peneliti/Dosen/Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.
 - 2) Kategori Pelopor Ketahanan Pangan, atas nama Untung Wijanarko, A.Md, Tani Organik Merapi/TOM, Wukirsari, Cangkringan
 - 3) Kategori Pembina Ketahanan Pangan, atas nama Drs. Hadi Sunyoto, Kepala Desa Sumberadi, Mlati
 - 4) Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan, atas nama Moch. Ehrfan, Penyuluh Perikanan Penyelia di UPT BP3K Wilayah VI Cangkringan-Ngemplak



- b. Penghargaan dalam rangka Adibakti Mina Bahari:
- 1) Penyuluh Teladan atas nama Moch. Ehrfan, Penyuluh Perikanan Penyelia di UPT BP3K Wilayah VI Cangkringan-Ngemplak
 - 2) Juara Lomba Masak Serba Ikan atas nama Retno Lestari, PKK Kecamatan Pakem.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	NA	1,67	1,68
2.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	NA	2,05	2,05
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	5.196.816	5.321.038	5.149.000
4.	Nilai Ekspor	US\$	NA	33.488.303,36	45.000.000
5.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	%	NA	2,79	3,2
6.	Nilai Tukar Petani	Nilai	NA	108,23	112,70
7.	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan	%	NA	(2,21)	3,26

Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8. Program Pengembangan Kemitraan
9. Program Pengembangan Desa Wisata
10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan



Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
13. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
14. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
16. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
19. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
20. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
21. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
22. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
23. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp34.150.573.542,00 dari anggaran sebesar Rp37.118.280.587,00, atau 92,00%. Realisasi keuangan sebesar 92,00% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 78,06%, maka terjadi inefisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

8. Evaluasi Kinerja Sasaran 8: “Meningkatnya Kesempatan Kerja”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 103,00% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 8 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,00	5,82	103,00

Sumber data: Disnakersos Kabupaten Sleman Tahun 2016

Tingkat Pengangguran Terbuka diukur dengan membandingkan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016 jumlah penganggur di Kabupaten Sleman sebanyak 34.360 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 590.443 orang, sehingga diperoleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,82%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 6,00%, maka pencapaian kinerja sebesar 103%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 lebih kecil dibandingkan kondisi dari tahun 2015 yang mencapai 6,12% atau terjadi penurunan sebesar 0,30%.



Pelaksanaan Padat Karya di Kabupaten Sleman, sebagai salah satu upaya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	NA	5,82	5,40

Sasaran menurunnya “Meningkatnya Kesempatan Kerja” tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



4. Program Transmigrasi Regional

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp7.595.445.450,00 dari anggaran sebesar Rp8.285.596.228,00, atau 91,67%. Realisasi keuangan sebesar 91,67% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a. Program penanganan pengangguran dilaksanakan secara terpadu antar dinas instansi antara lain kegiatan padat karya produktif (4) diikuti pelatihan, penguatan modal
- b. Penempatan tenaga kerja dengan mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sejumlah 2.274 orang melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), LPTKS (Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta) dan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
- c. Pelayanan informasi bursa kerja melalui Sistem berbasis web “Bursa Kerja *On Line*” (BKOL).
- d. Perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha baru sejumlah 120 orang.

Hambatan pencapaian sasaran:

- a. Motivasi pencari kerja untuk bekerja kurang
- b. Lowongan kerja yang tersedia tidak selalu diminati oleh pencari kerja
- c. Rendahnya pengetahuan lulusan sekolah menengah kejuruan terhadap aturan ketenagakerjaan maupun kondisi yang akan dihadapi dalam lingkungan kerja
- d. Tingginya mobilitas keluar masuknya tenaga kerja di perusahaan sebagai akibat penerapan sistem kontrak.

Prestasi:

PT. Mitra Adi Jaya dan PT. HM Sampoerna mendapat Penghargaan Zero Accident Tingkat Nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan

9. Evaluasi Kinerja Sasaran 9: “Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 112,87% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 9 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	65,99	75,00	113,65
2.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	65,25	73,14	112,09
Rata-rata capaian					112,87

Sumber data: Bappeda dan DPUP Kabupaten Sleman Tahun 2016

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas



Salah satu embung di wilayah Kabupaten Sleman

Realisasi prasarana dan sarana perekonomian dihitung dari sarana prasarana yang berkualitas terdiri Pasar Kabupaten sebanyak 50%, Obyek Wisata sebesar 100%, dan Embung dan Saluran Irigasi sebanyak 75%.

b. Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap

Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap sebesar 73,14% dari target 65,25%, dengan capaian 112,09%.



Salah satu jembatan di wilayah Kabupaten Sleman, prasarana dan sarana perekonomian

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.23 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang Berkualitas	%	NA	75,00	76,00
2.	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	NA	73,14	66,25

Sasaran meningkatnya prasarana dan sarana perkonomian tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
9. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
11. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
13. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
14. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
15. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
16. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
17. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp241.652.966.625,00 dari anggaran sebesar Rp254.683.305.632,00, atau 94,88%. Realisasi keuangan sebesar 94,88% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 112,87%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a. Alokasi anggaran yang cukup memadai dari APBN dan APBD, sehingga dilaksanakan peningkatan jalan sepanjang 12,85 km, pada 9 ruas jalan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan

sepanjang 19,4 km, pada 13 ruas jalan, pembangunan jembatan 3 buah dan Pembangunan pasar 2 pasar kabupaten.

- b. Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan dan tepat waktu.

Hambatan/kendala:

- Kerusakan jalan terjadi lebih cepat akibat tinggi arus kendaraan, khususnya angkutan umum barang yang dengan tonase tinggi dan faktor curah hujan sepanjang tahun.

Prestasi:

- Meraih Penghargaan sebagai 10 Kota/Kabupaten Terbaik dalam “Indonesia Road Safety Award 2016”.



10. Evaluasi Kinerja Sasaran 10: “Menurunnya Kemiskinan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Kemiskinan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,40% dan termasuk predikat **“sangat berhasil”**. Data capaian kinerja sasaran 10 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase KK Miskin	%	10,69	10,64	100,40

Sumber data: BKBPMPP Kabupaten Sleman Tahun 2016

Persentase KK Miskin di tahun 2016 dari target 10,69% terealisasi sebesar 10,64%. Capaian KK Miskin dihitung dari jumlah KK miskin 38.873 KK dibagi jumlah KK se-Kabupaten Sleman 365.207 KK. Angka Kemiskinan Kabupaten Sleman lebih baik dibandingkan capaian Angka Kemiskinan Provinsi DIY sebesar 13,34% dan Tingkat Kemiskinan Nasional yang mencapai 10,86%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.25 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Persentase KK Miskin	%	11,76	10,64	8,00

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Program Pembinaan Anak Terlantar
5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
12. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
13. Program Pengembangan Energi Terbarukan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp11.988.445.360,00 dari anggaran sebesar Rp12.700.563.035,00 atau 94,39%. Realisasi keuangan sebesar 94,39% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,40%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Ilustrasi KK Miskin yang tetap bersemangat dan berkarya, pendukung menurunnya kemiskinan



Hambatan penurunan Angka Kemiskinan:

- a. Sikap mental sebagian masyarakat yang mengaku miskin ketika akan memperoleh fasilitas dari pemerintah
- b. Penanganan masih bersifat umum belum ada pemetaan yang mendasar dalam pemberian intervensi pengentasan kemiskinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- a. Pengelolaan data kemiskinan menggunakan Sistem Informasi Kemiskinan.
- b. Penanganan kemiskinan melalui:
 - 1) Penyaluran beasiswa bagi 19.879 siswa keluarga tidak mampu atau Jaminanan P Pendidikan Daerah (JPPD).
 - 2) Penyampaian bantuan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 419 rumah.
 - 3) Penyampaian bantuan lain melalui peran Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Padukuhan, maupun peran serta swasta dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

11. Evaluasi Kinerja Sasaran 11: “Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 112,69% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 11 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.26 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana				
	- Desa	Jumlah	21	24	114,28
	- Sekolah	Jumlah	36	40	111,11
Rata-rata Capaian					112,69

Sumber data: BPBD Kabupaten Sleman Tahun 2016

Jumlah Lembaga tangguh bencana, meliputi Desa Tangguh Bencana (Destana) dari target 21, telah terealisasi sebanyak 24 desa, atau mencapai 114,28% dan Sekolah Siaga Bencana (SSB) realisasinya 40 sekolah yang melebihi target yang ditetapkan sebanyak 36 sekolah, sehingga realisasinya mencapai 111,11%. Rata-rata capaian kinerja 112,69%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana				
	- Desa	Jumlah	NA	24	61
	- Sekolah	Jumlah	NA	40	76

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Resiko Bencana tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp8.567.367.151,00 dari anggaran sebesar Rp9.549.740.895,00 atau 89,71%. Realisasi keuangan sebesar 89,71% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 112,69%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Gladi Lapang Penanggulangan Bencana, salah satu upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

- Dukungan dan kerjasama BPBD Pemda DI Yogyakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Dukungan dana Pemerintah Desa, sehingga Destana yang terbentuk dalam melaksanakan kegiatan antara lain dapat menindaklanjuti Rencana Penanggulangan Bencana Desa.
- Peran serta pihak swasta seperti PT. Mega Andalan Kalasan yang memberikan bantuan peralatan kesehatan (dragbar) dan PT. Taman Wisata Candi Prambanan dan Candi Boko memberi bantuan dana untuk mitigasi fisik di desa.

Hambatan:

- Sistem dan prosedur pemberian bantuan barang/peralatan kepada Desa Tangguh Bencana cukup panjang, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara cepat.
- Koordinasi dan dukungan organisasi perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Siaga Bencana belum Optimal.

Prestasi:

- Penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai “BPBD Kabupaten/Kota Terbaik Wilayah III (Bali dan Jawa)”



12. Evaluasi Kinerja Sasaran 12: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 140,98% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 12 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.28 Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			
			Bobot	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pencemaran Air	Nilai	30%	42,00	42,00	100,00
2.	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	30%	40,00	87,07	217,68
3.	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	Nilai	40%	32,25	33,95	105,27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				36,38	52,30	140,98

Sumber data: BLH Kabupaten Sleman Tahun 2016



Upaya-upaya menjaga kualitas air sungai agar tetap terminimalisir dari pencemaran

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks Pencemaran Air (IPA)

Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai dengan sampel di 60 titik pada Sungai Deggung, Boyong-Code, Pelang, Gajahwong, Konteng, Bedok, Opak, Tepus Kuning, Blotan Kruwet, dan Progo, air disajikan dalam table berikut.

Tabel 3.29 Hasil Pemantauan Pencemaran Sungai Kabupaten Sleman

No	Waktu Pemantauan	Memenuhi baku mutu	Tercemar Ringan	Tercemar Sedang	Tercemar Berat
1.	Musim hujan (bulan Januari 2016)	11 titik (18%)	29 titik (48%)	13 titik (22%)	7 titik (12%)
2.	Musim kemarau (bulan September 2016)	6 titik (10%)	25 titik (42%)	20 titik (33%)	9 titik (15%)

Sumber data: BLH Kabupaten Sleman Tahun 2016

Dengan menggunakan formulasi penghitungan indeks pencemaran air sungai maka diperoleh nilai indek sebesar 44,67 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim hujan, dan nilai sebesar 39,33 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim kemarau. Apabila diambil nilai rata-rata hasil pemantauan pada musim hujan dan musim kemarau diperoleh nilai indeks pencemaran air sungai sebesar 42,00 (pencemaran air level baik).

Sungai di wilayah Kabupaten Sleman sebagian besar ditetapkan sebagai sungai kelas I (satu) berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi DIY.



Air sungai kelas I (satu) adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan kebutuhan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama. Namun demikian banyaknya sumber-sumber pencemar yang ada di sekitar sungai berupa permukiman, perdagangan, industri, kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan yang menghasilkan limbah cair yang langsung dibuang ke sungai, serta banyaknya pembuangan sampah illegal di badan sungai memengaruhi kondisi kualitas air sungai.

b. Indeks Pencemaran Udara (IPA)

Penghitungan nilai indek pencemaran uadara menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

dimana:

IPU = Indeks Pencemaran Udara
IPNO₂ = Indeks Pencemar NO₂
IP_{SO₂} = Indeks Pencemar SO₂

Hasil uji sampel udara ambient dengan metode pasif sampler (NO₂ dan SO₂) tahun 2016 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30 Hasil Uji Sampel Udara Ambient

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO ₂	12,68	40,00	0,3169
SO ₂	6,97	20,00	0,3486
Rata-Rata			0,3228
Indeks Pencemaran Udara			87,07

Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Penghitungan indeks tutupan hutan/vegetasi merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Pada tahun 2016 penghitungan luasan hutan di Kabupaten Sleman sebesar 72,26 terdiri dari hutan rakyat seluas 47,56 km², hutan konservasi seluas 18,81 km² dan ruang terbuka hijau perkotaan seluas 5,89 km².

Tabel 3.31 Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Slema 2016

No	Kabupaten	Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Luas Tutupan Hutan (km ²)	Hutan/Luas Wilayah	Indeks Tutupan Hutan
1.	Sleman	1.079.053	574,82	72,26	12,57%	33,95

Sumber data: BLH Kabupaten Sleman Tahun 2016

Dari hasil penghitungan di atas maka diperoleh indeks tutupan hutan/ vegetasi Kabupaten Sleman tahun 2016 adalah 33,95 (indeks tutupan hutan level baik).

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.32 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Indeks Pencemaran Air	Nilai	NA	42,00	47,00
2.	Indeks Pencemaran Udara	Nilai	NA	87,07	45
3.	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	Nilai	NA	33,95	32,30

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Program Perencanaan Tata Ruang
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
6. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
13. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
14. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
15. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp35.569.347.001,00 dari anggaran sebesar Rp38.023.423.993,00, atau 93,55%. Realisasi keuangan sebesar 93,55% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 140,98%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terhadap regulasi dan koordinasi antar instansi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan semakin intens.
- b. Pembinaan kali bersih pada 17 sungai, pembinaan lingkungan di sekolah/pondok pesantren berbudaya lingkungan (adiwiyata), pembinaan kampung hijau, lomba *green and clean* (kebersihan dan keteduhan) antar kecamatan, dan sebagainya.
- c. Pengendalian lingkungan melalui pelayanan izin lingkungan maupun penyelesaian pengaduan lingkungan.



Salah satu bentuk kegiatan pembinaan kali bersih



- d. Pelayanan pengelolaan sampah berupa 58 TPS besar, 278 TPS kecil, 41 TPS pasar, 14 TPS 3 R, 16 transfer depo, 16 container, 5 *truck armroll*, 33 *dump truck*, yang didukung tenaga sebanyak 185 orang.
- e. Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan semakin baik.

Hambatan:

- a. Pemahaman sebagian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih kurang.
- b. Sulitnya memperoleh menyediakan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau, sarana prasarana persampahan dan air limbah.
- c. Tingginya minat investasi namun ketersediaan lahan terbatas karena wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah konservasi air dan lahan pertanian yang subur.

Prestasi di bidang lingkungan hidup:

- a. Penghargaan Adiwiyata Nasional kepada SMP Negeri 3 Godean, Kabupaten Sleman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Penghargaan “Sanipura Award” tahun 2016 kategori “Inovasi Sanitasi berbasis Masyarakat” dari Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).
- c. Penghargaan Kampung Iklim kepada Padukuhan Pendulan, Sumberagung, Moyudan, Sleman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

13. Evaluasi Kinerja Sasaran 13: “Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 740% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 13 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.33 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	%	1	7,4	740

Sumber data: BKBPMP Kabupaten Sleman Tahun 2016

Persentase penurunan kasus Perempuan dan Anak korban kekerasan tahun 2016 sebesar 7,4%. Capaian ini dihitung dengan membandingkan 539 kasus yang terjadi pada tahun 2015, dengan 499 kasus di tahun 2016, sehingga terjadi penurunan sebanyak 40 kasus atau 7,4%, yaitu $(40/539) \times 100\%$. Target penurunan di tahun 2016 sebesar 1%, dengan realisasi 7,4%, sehingga capaian kinerja sebesar $(7,4/1 \times 100\%) = 740\%$. Data kasus korban kekerasan berasal dari laporan jejaring lintas instansi/lembaga yang terkait



dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sleman.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.34 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Nilai	NA	42,00	47,00

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp3.588.594.188,00 dari anggaran sebesar Rp3.816.688.301,00, atau 94,02%. Realisasi keuangan sebesar 94,02% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 740%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Strategi Pemecahan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:

- a. Penerapan 39 desa ramah anak, dan 39 sekolah ramah anak
- b. Pembentukan Kader Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di semua kecamatan dan desa, Satgas Perlindungan Perempuan Anak (PPA), Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Komite Perlindungan Anak di Sekolah, Forum Anak (Foran) Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, dan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- c. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Trafficking, Bullying, pencegahan kekerasan seksual pada anak, dan *Three Ends* (Akhirnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Akhirnya Perdagangan Manusia, dan Akhirnya Kesenjangan Ekonomi pada Perempuan).

Prestasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

- a. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama atas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian PPPA



- b. Penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia Tingkat SD kepada Vanessa Putri dan Ega Sanjaya pada Peringatan Hari Anak Nasional dari Kementerian PPPA
- c. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memperoleh pengakuan ISO 9001:2015.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- a. Tersedianya sarana prasarana layanan penanganan korban kekerasan
- b. Kemampuan Sumberdaya Manusia dalam penanganan Kekerasan
- c. Adanya jejaring kelembagaan yang terkoordinir dengan baik untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak.

14. Evaluasi Kinerja Sasaran 14: “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**sangat berhasil**”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.35 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Konflik SARA	Kasus	≤5	0	100

Sumber data: Kantor Kesbang Kabupaten Sleman Tahun 2016

Jumlah konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) pada tahun 2016 tercatat 0 ((nihil), artinya tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Sleman. Meskipun selama tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus berpotensi memicu konflik SARA yaitu (1) kejadian pengrusakan Patung Bunda Maria di Goa Sri Ningsih, Prambanan; (2) Permasalahan kegiatan ibadah di Ruko Palagan, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati. Kedua kejadian tersebut tidak sampai meluas dan berkembang menjadi konflik berkat upaya persuasif dari Pemerintah Daerah, aparat TNI/POLRI, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sleman, Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan tokoh masyarakat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.36 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Jumlah Konflik SARA	Nilai	NA	42,00	47,00

Sasaran meningkatnya kerukunan masyarakat tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp10.798.464.277,00 dari anggaran sebesar Rp11.558.979.250,00 atau 93,27%. Realisasi keuangan sebesar 93,42% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Kegiatan yang bersifat preventif seperti sarasehan, sosialisasi, forum-forum kemitraan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup rukun penuh toleransi dan saling menghormati.
2. Peran serta masyarakat dalam berdialog menyelesaikan permasalahan masyarakat yang menjunjung prinsip toleransi, dan kebhinekaan masih cukup baik.
3. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat yang kharismatik cukup mampu meredam gejolak di kalangan umat.

Hambatan:

1. Adanya kelompok di masyarakat yang diduga kegiatannya cenderung mengarah pada paham radikalisme dan ekstrimisme.
2. Mobilitas penduduk dari luar daerah yang memiliki latar belakang budaya, agama dan adat istiadat yang berbeda cukup dinamis di wilayah Kabupaten Sleman karena terdapat banyak perguruan tinggi, obyek wisata (termasuk hotel, restoran, pusat perbelanjaan), sehingga menimbulkan potensi konflik yaitu sesama pendatang maupun antara pendatang dengan penduduk asli.



- Pemahaman masyarakat mengenai proses pendirian tempat ibadah sebagai potensi konflik belum memadai.

15. Evaluasi Kinerja Sasaran 15: “Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,29% dengan predikat “**sangat berhasil**”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.37 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pelestarian warisan budaya	%	23,80	23,87	100,29

Sumber data: Disbudpar Kabupaten Sleman Tahun 2016

Persentase pelestarian warisan budaya pada tahun 2016 terealisasi 23,87% dari target 23,80%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,29%. Persentase pelestarian warisan budaya yang terdiri dari monumen, situs, museum, bangunan, struktur, dan rumah tradisional. Dihitung warisan budaya yang dilestarikan sebanyak 191 buah dari jumlah total sebanyak 800 buah, yaitu $(191/800) \times 100\% = 23,87\%$.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.38 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target 2021
1.	Persentase pelestarian warisan budaya	Nilai	17,63	42,00	47,00

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya.



Candi Sambisari, salah satu warisan budaya di Kabupaten Sleman

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp6.017.174.550,00 dari anggaran sebesar Rp6.443.786.600,00, atau 93,38%. Realisasi keuangan sebesar 98,58% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,29%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya:

- a. Pembinaan yang intensif terhadap kepada pemilik, pelestari warisan budaya dan potensi warisan budaya, termasuk melalui pemberian penghargaan berupa penetapan warisan budaya dalam Surat Keputusan Gubernur/Bupati, bantuan dana, dan rehabilitasi bangunan warisan budaya.
- b. Dukungan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.

Prestasi yang diraih selama tahun 2016:

- Upacara Adat “Mbah Demang” Modinan, Banyuraden, Gamping diberikan penghargaan sebagai “Warisan Budaya Tak Benda” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.



Prosesi Upacara Adat “Mbah Demang” Modinan, Banyuraden, Gamping



D. Akuntabilitas Keuangan dalam Pencapaian Sasaran

1. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2016 sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016, yaitu untuk mencapai 15 sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp1.136.246.873.957,00 dan terealisasi sebesar Rp1.030.060.040.885 atau 90,65%.

Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.39 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitaas kinerja dan keuangan daerah	74.214.239.597	58.437.837.737	78,74	Belum diketahui	Belum diketahui
2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	17.188.430.472	15.809.329.653	91,98	102,67	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	191.572.729.073	165.231.562.797	86,27	100,87	Efisien
4	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	370.887.130.119	340.843.719.578	91,90	100,13	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	91.083.219.175	81.552.002.023	89,54	103,71	Efisien
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	9.165.761.000	8.257.210.953	90,09	92,91	Efisien
7	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	37.118.280.587	34.150.573.542	92,00	78,06	Tidak Efisien
8	Meningkatnya kesempatan kerja	8.285.596.228	7.595.445.450	91,67	103,00	Efisien
9	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	254.683.305.632	241.652.966.625	94,88	112,87	Efisien
10	Menurunnya kemiskinan	12.700.563.035	11.988.445.360	94,39	100,40	Efisien
11	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	9.549.740.895	8.567.367.151	89,71	112,69	Efisien
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	38.023.423.993	35.569.347.001	93,55	140,98	Efisien
13	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	3.816.688.301	3.588.594.188	94,02	740,00	Efisien
14	Meningkatnya kerukunan masyarakat	11.558.979.250	10.798.464.277	93,27	100,00	Efisien
15	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	6.443.786.600	6.017.174.550	93,38	100,29	Efisien



2. Analisis Efisiensi Dana Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari dana dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Pada tahun 2016, penerima program dan kegiatan dana dekonsentrasi di Provinsi DIY yang berlokasi di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40 Analisis Efisiensi Dana Dekonsentrasi Tahun 2016

No	Kementerian	Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1	Kementerian Dalam Negeri	2.398.598.000	56,01	41,02	Efisien
2	Kementerian Pertanian	40.889.591.000	99,91	87,44	Efisien
3	Kementerian Perindustrian	3.957.000.000	100,00	37,78	Efisien
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	8.844.209.000	98,39	95,58	Efisien
5	Kementerian Kesehatan	20.565.884.000	85,56	49,46	Efisien
6	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.490.390.000	99,68	91,33	Efisien
7	Kementerian Sosial	19.582.674.000	99,97	99,24	Efisien
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.496.657.000	9,50	5,40	Efisien
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.400.778.000	87,63	72,97	Efisien
10	Kementerian Pariwisata	6.963.000.000	94,29	87,84	Efisien
11	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	920.491.000	57,82	57,82	Efisien
12	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	3.301.942.000	100,00	64,00	Efisien
13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	362.614.000	100,00	90,70	Efisien
14	Badan Koordinasi Penanaman Modal	644.931.000	66,24	66,24	Efisien
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	6.675.971.000	95,07	0,10	Efisien
16	Arsip Nasional Republik Indonesia	316.018.000	96,20	96,20	Efisien
17	Kementerian Perdagangan	2.935.623.000	82,40	85,47	Tidak Efisien
18	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	7.287.680.000	100,00	94,76	Efisien
Jumlah		141.034.357.000	84,93	67,96	



3. Analisis Efisiensi Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman menerima 6 DIPA dari urusan tugas pembantuan, yang terdiri dari 6 program di 13 kegiatan yang dikelola oleh 3 OPD, yaitu Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; serta Dinas Tenaga Kerja.

Jumlah Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp9.425.976.000,00, dan terealisasi sebesar Rp8.456.006.554,80 atau sebesar 89,71% dan fisik sebesar 120,14%.

Tabel 3.41 Analisis Efisiensi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2016

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan(%)	Keterangan
1	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	4.010.000.000	99,17	88,94	Efisien
2	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1.911.783.000	100	84,43	Efisien
3	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	192.617.000	280	96,04	Efisien
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.586.043.000	87,53	87,53	Efisien
5	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	700.000.000	89,12	89,12	Efisien
6	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1.025.533.000	96,74	96,74	Efisien

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan terjadi antara lain karena:

1. Realisasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai harga pasar/lebih rendah dari Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), tidak sepenuhnya mengacu pada harga yang tercantum dalam SHBJ.
2. Terdapat anggaran yang tidak direalisasikan, khususnya yang bersifat *supporting* (misalnya makan minum rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah), tanpa mengurangi esensi pemenuhan kebutuhan.
3. Mekanisme perubahan anggaran dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, lebih pada penggeseran-penggeseran anggaran yang tidak terealisasi ke dalam pos-pos pembiayaan yang membutuhkan anggaran lebih.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada tahun pertama masa bhakti Bupati/Wakil Bupati Sleman tahun 2016-2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 termasuk perubahannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 15 sasaran, yang terdiri dari 40 indikator kinerja dengan realisasi kerjanya sehingga dapat diketahui persentase capaian kerjanya. Hasil pengukuran kinerja meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori sangat berhasil sebanyak 13 sasaran atau 86,66%, capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori berhasil sebanyak 1 sasaran atau 6,67%, capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori cukup berhasil sebanyak 1 sasaran atau 6,67%, dan capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori kurang berhasil sebanyak 1 sasaran atau 6,67%.

Tindak lanjut atas rekomendasi yang tertulis dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/377/AA.05/2017 tanggal 31 Januari 2017 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.

1. Penyempurnaan keselarasan penjabaran kinerja dari sasaran strategis ke indikator sampai indikator individu, akan dilaksanakan sejalan review RPJMD tahun 2016-2021 sehubungan perubahan organisasi perangkat daerah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan penyesuaian nomenklatur indikator sasaran mengacu istilah baku yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Penyempurnaan aplikasi yang dapat mengintegrasikan informasi kinerja dan keuangan level kabupaten, perangkat daerah, dan individu akan diupayakan sejalan review penyusunan formasi pegawai dan pengembangan penilaian kinerja pegawai melalui e-kinerja.
3. Menyempurnakan dan mendorong dalam pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja sampai level desa, akan diupayakan melalui pengembangan sistem yang mendorong pengelolaan kinerja dan keuangan desa lebih akuntabel.



4. Evaluasi program kegiatan sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah telah dilakukan, dan ditindaklanjuti *refocusing* program kegiatan dalam RKPD tahun 2018.

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Jumlah Program	184	179	182*)
2.	Jumlah Kegiatan	2.351	2.100	1.826*)

*) *Data sementara. Penambahan program menyesuaikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perubahan susunan organisasi perangkat daerah yang baru.*

5. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal, Inspektorat terus menerus melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas evaluator.



Pemerintah Kabupaten Sleman

